



Konsolidasi Hegemoni Neoliberal melalui Agenda *Global Governance Wef* Pasca Krisis 2008

Alindha Cahyani

Universitas Airlangga, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alindhacahyani74@gmail.com

Abstract. *This paper analyzes the role of the World Economic Forum (WEF) in shaping global governance after the 2008 financial crisis using a non-state-centric global governance perspective. It examines how the WEF, through various agendas such as the Global Redesign Initiative, Fourth Industrial Revolution, and The Great Reset, positions itself as a key actor in formulating responses to global instability. Despite promoting a narrative of collaboration, inclusivity, and multi-stakeholder partnerships, the analysis shows that the WEF actually refines and reproduces neoliberal hegemony through the dominance of private actors, market-based approaches, and undemocratic normative authority. This study also finds that the global governance mechanisms promoted by the WEF tend to widen inequality, create symbolic participation, and reinforce the power of the global economic elite. These findings highlight the normative dilemma in contemporary global governance and the need for a more accountable, inclusive, and public interest-oriented governance model.*

Keywords: *2008 Financial Crisis; Global Governance; Neoliberal Hegemony; Non-state Actors; World Economic Forum.*

Abstrak. Makalah ini menganalisis peran Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam membentuk tata kelola global setelah krisis keuangan 2008 menggunakan perspektif tata kelola global non-negara. Makalah ini mengkaji bagaimana WEF, melalui berbagai agenda seperti Inisiatif Desain Ulang Global, Revolusi Industri Keempat, dan The Great Reset, memposisikan dirinya sebagai aktor kunci dalam merumuskan respons terhadap ketidakstabilan global. Meskipun mempromosikan narasi kolaborasi, inklusivitas, dan kemitraan multi-pemangku kepentingan, analisis menunjukkan bahwa WEF sebenarnya menyempurnakan dan mereproduksi hegemoni neoliberal melalui dominasi aktor swasta, pendekatan berbasis pasar, dan otoritas normatif yang tidak demokratis. Studi ini juga menemukan bahwa mekanisme tata kelola global yang dipromosikan oleh WEF cenderung memperluas ketidaksetaraan, menciptakan partisipasi simbolis, dan memperkuat kekuasaan elit ekonomi global. Temuan ini menyoroti dilema normatif dalam tata kelola global kontemporer dan kebutuhan akan model tata kelola yang lebih akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Krisis Keuangan 2008; Tata Kelola Global; Hegemoni Neoliberal; Aktor Non-Negara; Forum Ekonomi Dunia

1. PENDAHULUAN

Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi titik balik penting dalam dinamika ekonomi dan politik internasional. Krisis ini tidak hanya mengguncang stabilitas keuangan, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan institusi formal seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB dalam merespons gejolak global secara efektif. Keterbatasan lembaga-lembaga negara-sentris tersebut menciptakan vacuum of authority dalam tata kelola global dan mendorong kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali arsitektur global governance. Dalam konteks inilah aktor non-negara, khususnya World Economic Forum (WEF), mulai menempati posisi strategis sebagai fasilitator lintas sektor yang menawarkan kerangka baru dalam upaya mengatasi tantangan global pasca krisis.

Krisis ekonomi global tahun 2008 adalah krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para pakar ekonomi dunia menyebutnya sebagai *The Mother of All Crises*.

Krisis tersebut berawal dari kondisi domestik AS dengan hipotek subprima yang mengalami krisis, kemudian berkembang menjadi krisis global ketika runtuhnya Lehman Brothers, suatu institusi finansial telah terlibat dalam praktik investasi di pasar AS, pada 15 september 2008. Penyebab pertama dari krisis ini adalah hipotek subprima yang dapat dikatakan sebagai pemilik rumah yang tidak seharusnya memiliki rumah. Penyebab lainnya adalah adanya sekuritisasi yang dapat didefinisikan sebagai pengonversian sekelompok kredit menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan, meliputi piutang pokok dan bunga. Dua hal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akumulasi kredit di AS sehingga mendorong berjalannya sistem finansial. Mengacu pada teori Financial Development, seharusnya perkembangan sistem finansial dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah perputaran kredit. Namun pada saat itu terjadi situasi default, yaitu ketika hipotek tidak mampu membayar kredit beserta bunganya karena harga rumah yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga rumah dan menjadi salah satu faktor penyebab krisis finansial (Putri, 2018).

Setelah krisis keuangan global tahun 2008, kebutuhan untuk merumuskan ulang struktur tata kelola global menjadi semakin mendesak. Ketidakmampuan lembaga formal seperti IMF, Bank Dunia, dan bahkan PBB untuk mengantisipasi dan merespons krisis secara efektif menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi dan efisiensi lembaga-lembaga negara-sentris. Dalam konteks ini, aktor non-negara seperti World Economic Forum (WEF) mulai memainkan peran strategis. WEF yang selama ini dikenal sebagai forum elit tahunan di Davos, mereposisi dirinya sebagai fasilitator kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi tantangan global pasca-krisis.

Menurut Klaus Dingwerth dan Phillipp Pattberg (2006), global governance adalah perspektif non-negara-sentris dalam memandang politik global (Dingwerth & Pattberg, 2006). Mereka menekankan bahwa tata kelola global semakin ditentukan oleh aktor-aktor non-negara, jaringan transnasional, dan sistem aturan informal yang terbentuk dari interaksi lintas sektor. WEF adalah contoh konkret dari tata kelola non-tradisional tersebut. Dalam perspektif Dingwerth, WEF mencerminkan *Multiactor Governance*, WEF melibatkan perusahaan, LSM, akademisi, dan media, bukan hanya negara. *Emerging Authority*, meskipun tidak formal, WEF memproduksi norma, wacana, dan arah kebijakan global. *Normative Governance*, WEF tidak netral, ia membawa nilai dan visi dunia tertentu yaitu neoliberal berbasis pasar. *World Economic Forum* (WEF) yang merupakan forum global yang berfokus pada kerja sama publik-swasta telah menyediakan platform untuk pemangku kepentingan dari berbagai sektor

(perusahaan, pemerintah, akademisi, dll) untuk membahas isu-isu ekonomi global, termasuk krisis keuangan 2008. WEF adalah organisasi internasional untuk kerja sama publik-swasta. Forum ini menyediakan platform global, tidak memihak, dan nirlaba untuk hubungan yang bermakna antara para pemangku kepentingan guna membangun kepercayaan, dan membangun inisiatif untuk kerja sama dan kemajuan (World Economic Forum). Keterlibatan WEF dalam krisis global 2008 lebih fokus pada upaya untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi melalui kerja sama lintas sektor. WEF secara tidak langsung menyebabkan krisis, tetapi berperan dalam membantu berbagai pemangku kepentingan untuk memahami dan merespon tantangan yang muncul (Marshall, 2015).

Konsep global governance dalam perspektif non-negara-sentris sebagaimana dikembangkan oleh Klaus Dingwerth dan Philipp Pattberg (2006), menawarkan kerangka analitis untuk memahami transformasi struktur kekuasaan dalam sistem internasional yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dalam pendekatan ini, negara bukan lagi aktor tunggal atau dominan dalam proses pengambilan keputusan global. Sebaliknya, tata kelola global kini dilihat sebagai hasil dari interaksi dan negosiasi antara berbagai aktor: organisasi internasional, LSM, perusahaan transnasional, komunitas epistemik, media, dan lembaga filantropi (Dingwerth & Pattberg, 2006). Tata kelola menjadi semakin horizontal, berjejaring, dan multilevel. Konsep emerging authority dalam kerangka Dingwerth & Pattberg juga sangat relevan di sini. Meskipun tidak memiliki mandat legal seperti PBB atau WTO, WEF telah berhasil membangun otoritas simbolik dan epistemik dalam berbagai isu strategis global, mulai dari teknologi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga masa depan pekerjaan. Otoritas ini muncul dari kemampuannya untuk mengagregasi wacana elit dan menyusun agenda bersama aktor-aktor berpengaruh lintas negara dan sektor. Namun, penting dicatat bahwa meskipun WEF beroperasi di luar struktur formal negara, ia tidak bebas nilai atau netral. Justru, dalam perspektif normative governance, WEF secara aktif menyebarkan visi dunia tertentu, yakni *pasar bebas yang disesuaikan*. Inisiatif seperti *The Fourth Industrial Revolution* (2016) dan *The Great Reset* (2020) mengemas kembali nilai-nilai neoliberal dalam bahasa teknologi, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan, tanpa mengubah struktur relasi kekuasaan yang timpang antara negara-negara utara dan selatan, atau antara elit dan masyarakat akar rumput.

Urgensi kajian ini terletak pada semakin menguatnya peran aktor privat dalam membentuk agenda global, di tengah melemahnya legitimasi institusi multilateral tradisional. WEF, yang sebelumnya dipandang sebagai forum elit tahunan, mengembangkan serangkaian inisiatif seperti *Global Redesign Initiative*, *Fourth Industrial Revolution*, dan *The Great Reset* sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan tata kelola global. Namun, berkembangnya

pengaruh WEF menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana forum ini benar-benar menciptakan tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan demokratis, atau justru memperhalus dominasi neoliberalisme dalam wajah baru.

Dengan demikian, konsep global governance non-negara-sentris dapat menjelaskan peran WEF sebagai aktor global yang beroperasi di luar kerangka legal formal, membangun legitimasi melalui jaringan dan otoritas diskursif, mengkonstruksi narasi tentang solusi global, dan mereproduksi struktur dominasi neoliberal melalui mekanisme soft power dan framing wacana. Akan tetapi, pendekatan ini juga mengundang kritik. Jika tata kelola global semakin dikendalikan oleh aktor-aktor non-demokratis seperti korporasi dan lembaga privat, maka muncul masalah serius dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang setara. Global governance bisa menjadi bentuk baru dari hegemoni global, di mana aktor dominan menyebarkan nilai-nilai mereka secara halus, melalui bahasa partisipatif yang tidak benar-benar inklusif.

Dalam kerangka teoritis, tulisan ini menggunakan perspektif global governance non-negara-sentris sebagaimana dirumuskan oleh Dingwerth dan Pattberg (2006), yang menekankan bahwa tata kelola global semakin ditentukan oleh aktor non-negara, jaringan transnasional, dan struktur informal. Konsep multiactor governance, emerging authority, dan normative governance dalam pendekatan tersebut menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana WEF membangun otoritas simbolik, memproduksi wacana, dan mempengaruhi arah kebijakan global. Literatur mengenai kritik terhadap neoliberalisme serta hubungan antara agenda WEF dan dominasi ekonomi global turut digunakan untuk memetakan posisi WEF dalam konfigurasi kekuasaan kontemporer.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana WEF memanfaatkan momentum pasca krisis keuangan 2008 untuk memperkuat perannya dalam struktur global governance, sekaligus menjelaskan bagaimana berbagai agenda yang diusungnya mereproduksi dan memperhalus hegemoni neoliberal. Analisis ini didasarkan pada penelaahan inisiatif WEF serta diskursus yang dibangun melalui kebijakan dan dokumen resminya, yang kemudian dibandingkan dengan temuan dalam literatur kritis mengenai peran aktor privat dalam tata kelola global.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini mengadopsi rencana pemecahan masalah yang terdiri dari: pertama, menguraikan basis konseptual global governance non-negara-sentris; kedua, menjelaskan posisi WEF sebagai emerging authority; ketiga, menganalisis tiga agenda utama WEF pasca krisis, yaitu *Global Redesign Initiative*, *Fourth*

Industrial Revolution, dan *The Great Reset* sebagai instrumen reproduksi nilai-nilai neoliberal; dan keempat, menilai implikasi normatif dari dominasi aktor privat terhadap prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan global.

Dengan demikian, tulisan ini berargumen bahwa meskipun WEF mengusung narasi kolaboratif dan inklusif, agenda-agenda yang dikembangkannya tidak mengarah pada transformasi struktural yang demokratis, melainkan memperhalus dominasi neoliberalisme melalui mekanisme diskursif dan kemitraan multipihak yang tidak setara. Pendekatan ini penting untuk mengungkap dilema fundamental dalam tata kelola global kontemporer serta membuka ruang bagi kritik terhadap model governance yang cenderung mengutamakan kepentingan elit ekonomi global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran World Economic Forum (WEF) dalam membentuk tata kelola global pasca krisis keuangan 2008 serta bagaimana agenda-agenda yang diusungnya mereproduksi hegemoni neoliberal. Kerangka analisis yang digunakan adalah perspektif global governance non-state-centric, yang menempatkan aktor non-negara sebagai elemen penting dalam dinamika tata kelola global. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan teori hegemoni untuk mengkaji bagaimana dominasi ide dan kepentingan neoliberal direproduksi melalui wacana dan praktik kelembagaan global. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi laporan resmi World Economic Forum, seperti Global Redesign Initiative, Fourth Industrial Revolution, dan The Great Reset, serta artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik global governance dan neoliberalism. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis wacana kritis (critical discourse analysis) untuk mengungkap bagaimana narasi kolaborasi, inklusivitas, dan multi-stakeholder yang dipromosikan WEF berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi dominasi aktor privat dan logika pasar. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, (2) penyajian data dalam bentuk narasi analitis, dan (3) penarikan kesimpulan yang menekankan pada relasi kuasa, kepentingan, dan implikasi normatif dari praktik global governance yang dikaji.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur dan dokumen resmi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mengurangi bias interpretasi.

3. HASIL DAN PEMBAASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa World Economic Forum (WEF) memainkan peran strategis sebagai aktor non-negara dalam membentuk tata kelola global pasca krisis keuangan 2008. Melalui berbagai inisiatif dan forum dialog global, WEF berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat koordinasi kebijakan yang menghubungkan aktor negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam kerangka global governance yang bersifat non-state-centric.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pasca krisis 2008, WEF tidak menggantikan paradigma ekonomi neoliberal, melainkan melakukan rekonstruksi dan adaptasi terhadapnya. Agenda-agenda utama seperti Global Redesign Initiative (2009), Fourth Industrial Revolution (2016), dan The Great Reset (2020) menunjukkan adanya upaya reformulasi neoliberal dalam bentuk yang lebih inklusif secara retorik, namun tetap mempertahankan dominasi logika pasar, peran sentral sektor swasta, serta pendekatan berbasis pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mekanisme global governance yang dipromosikan oleh WEF cenderung memperkuat peran aktor privat, khususnya korporasi multinasional, dalam proses pengambilan keputusan global. Model stakeholder governance yang diusung memberikan ruang partisipasi yang luas bagi berbagai aktor, namun dalam praktiknya terjadi ketimpangan kekuasaan, di mana aktor ekonomi global memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan negara berkembang maupun masyarakat sipil.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa narasi inklusivitas, keberlanjutan, dan kolaborasi yang diusung oleh WEF seringkali bersifat simbolik. Partisipasi masyarakat sipil lebih berfungsi sebagai legitimasi normatif daripada sebagai kekuatan substantif dalam menentukan arah kebijakan global. Hal ini mengindikasikan adanya praktik “pseudo-participation” dalam tata kelola global yang diinisiasi oleh WEF.

Keempat, dalam berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan global, perubahan iklim, gender, migrasi, dan energi, WEF secara konsisten mempromosikan solusi berbasis pasar. Pendekatan ini cenderung mengabaikan akar struktural dari ketimpangan global, termasuk

distribusi kekayaan, relasi kekuasaan, dan batas ekologis pertumbuhan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat global.

Kelima, dari perspektif global governance non-state-centric, WEF berhasil mendorong desentralisasi tata kelola global dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor dan negara. Namun, desentralisasi ini tidak sepenuhnya menghasilkan demokratisasi, melainkan justru membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan elit global dalam bentuk jaringan tata kelola informal yang minim akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa WEF berfungsi sebagai agen penting dalam reproduksi hegemoni neoliberal dalam tata kelola global pasca krisis 2008. Meskipun mengusung agenda reformasi dan kolaborasi, praktik yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan pasar dan elit ekonomi global, sehingga menimbulkan dilema normatif antara inklusivitas yang diklaim dan eksklusivitas yang terjadi dalam praktik.

Pembahasan

World Economic Forum (WEF) adalah organisasi internasional independen yang didirikan pada tahun 1971 dan berbasis di Jenewa, Swiss. Meskipun tidak memiliki kekuasaan legal atau struktur pengambilan keputusan formal seperti PBB, WEF menjadi pusat utama dalam pembentukan *global public-private dialogue*. Pasca krisis keuangan global 2008, peran WEF semakin menonjol sebagai aktor penting dalam tata kelola global. Krisis tersebut membuka pertanyaan besar tentang keberlanjutan sistem ekonomi global berbasis pasar bebas yang sangat didorong oleh nilai-nilai neoliberalisme, yaitu deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Namun alih-alih mendorong alternatif yang radikal, WEF merespons dengan sejumlah inisiatif besar yang justru dianggap oleh banyak kalangan sebagai *reinvention* dari neoliberalisme dalam kemasan yang lebih “manusiawi”. Contohnya adalah Global Redesign Initiative pada tahun 2009, The Fourth Industrial Revolution pada tahun 2016, dan The Great Reset pada tahun 2020.

Krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan evaluasi ulang terhadap tata kelola ekonomi global. Krisis ini menyoroti dominasi kebijakan neoliberal, yang telah mengakibatkan meningkatnya ketidakstabilan keuangan dan ketidaksetaraan. Meskipun demikian, WEF dan lembaga-lembaga global lainnya sebagian besar terus mempromosikan solusi-solusi neoliberal, meskipun dengan beberapa penyesuaian untuk mengatasi kritik dan tantangan baru (Chowdhury & Žuk, 2018). G20 yang mencakup WEF sebagai peserta utama, telah menjadi pusat desentralisasi otoritas dalam tata kelola ekonomi global. Pergeseran ini telah mengintegrasikan lebih banyak aktor dan jaringan yang lebih beragam, tetapi masih beroperasi dalam kerangka kerja neoliberal yang memprioritaskan solusi berbasis pasar (Luckhurst,

2019). WEF juga telah membahas isu-isu seperti perubahan iklim, dengan mbingkainya dalam kerangka risiko global yang membutuhkan solusi berbasis pasar. Pendekatan ini sering kali mengabaikan perubahan struktural yang lebih dalam yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara komprehensif (Walker, 2021).

Global Redesign Initiative (GRI) yang dicanangkan oleh WEF pada tahun 2009 diinisiasi sebagai respons terhadap kegagalan institusi internasional dalam mencegah krisis 2008. GRI mengusulkan *stakeholder governance model*, dimana aktor-aktor non negara (koporasi, LSM, lembaga filantropi) memiliki peran setara dengan negara dalam penyusunan kebijakan global. Dalam hal ini, GRI memperkuat posisi korporasi dalam proses pengambilan keputusan global. Selain itu terdapat The Fourth Industrial Revolution (4IR) yang menggaungkan narasi transformasi digital dan teknologi sebagai solusi untuk tantangan global. 4IR lebih berfokus pada efisiensi dan inovasi pasar, bukan pada keadilan sosial, redistribusi kekayaan, atau hak buruh. Dan yang terakhir terdapat The Great Reset pada tahun 2020, dimana hal ini muncul pada saat pandemic COVID-19 tahun 2020 yang mengusulkan restrukturisasi sistem ekonomi global menuju pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sangat kabur dan tidak menyentuh akar ketimpangan struktural, namun cenderung menjadi wacana simbolik.

WEF secara signifikan mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan neoliberalisme dalam struktur tata kelola global. Beberapa abstrak memberikan wawasan tentang bagaimana WEF selaras dengan prinsip-prinsip neoliberal. WEF merupakan pemain utama dalam tata kelola kesehatan global, yang mempromosikan peran sektor swasta dan kemitraan public-swasta tertentu. Pendekatan ini konsisten dengan neoliberalisme yang menekankan pentingnya solusi yang digerakkan oleh pasar dan keterlibatan sektor swasta dalam urusan publik (McNeill, 2023). Wacana WEF mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan politik neoliberal. WEF mbingkai kesetaraan gender dalam kerangka daya saing ekonomi nasional, menciptakan subjektivitas perempuan yang sesuai dengan neoliberal seperti “perempuan ekonomi rasional” atau “perempuan Davos”. Representasi ini menyelaraskan isu-isu gender dengan pertumbuhan ekonomi, sebuah prinsip utama neoliberalisme (Elias, 2013). Proyek Pertumbuhan dan Pembangunan Inklusif (Inclusive Growth and Development/IGD) WEF merupakan upaya untuk melegitimasi kembali kapitalisme neoliberal. Proyek ini mempromosikan pertumbuhan sebagai solusi untuk masalah kapitalisme dan mbingkai inklusi sosial dalam konteks neoliberal. Meskipun telah dikemas ulang, kebijakan-kebijakan tersebut sebagian besar masih bersifat neoliberal dan gagal untuk mengatasi batas-batas ekologis terhadap pertumbuhan (Saqr, 2023).

Pengaruh WEF meluas ke tata kelola migrasi, di mana WEF mempromosikan pendekatan multipihak yang digerakkan oleh perusahaan. Pendekatan ini menekankan kerja sama global secara sukarela di antara aktor-aktor negara dan non-negara yang dipilih, yang mencerminkan prinsip-prinsip neoliberal tentang tata kelola yang digerakkan oleh pasar dan keterlibatan badan-badan swasta dalam kebijakan publik (Likić-Brborić, 2024). Pembingkai WEF mengenai keterkaitan antara sistem air, pangan, dan energi berakar pada perspektif teknis pasar, yang menutupi isu-isu politis seperti ketidaksetaraan dan kelangkaan sumber daya. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan neoliberal yang memprioritaskan solusi pasar daripada mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang lebih dalam (Allouche, Middleton, & Gyawali, 2015). Kebijakan-kebijakan neoliberal telah menyebabkan ketidaksetaraan dalam pekerjaan dan menghadapkan para pekerja pada berbagai risiko. Laporan Risiko Global WEF menyoroti kegagalan dalam mengatasi perubahan iklim, yang memperparah ketidaksetaraan ini. Laporan tersebut menyarankan bahwa kebijakan neoliberal perlu dipertimbangkan kembali untuk mengurangi perubahan iklim dan mendukung lapangan kerja (Walker, 2021).

Dalam pendekatan kritis terhadap global governance, banyak akademisi (misalnya Stephen Gill, Susan Strange, dan William I. Robinson) menyatakan bahwa global governance seringkali menjadi kendaraan hegemoni neoliberal. Dalam konteks WEF, bahasa “inklusif”, “sustainability”, dan “stakeholder capitalism” hanya memperhalus dominasi ekonomi pasar. WEF memperkuat posisi elit global, terutama perusahaan multinasional dan tokoh finansial, dalam mendefinisikan kebijakan global tanpa adanya akuntabilitas demokratis. Masyarakat sipil memang diundang untuk berkontribusi, namun lebih sering digunakan sebagai simbol legitimasi, bukan mitra sejajar dalam perumusan kebijakan. Banyak organisasi masyarakat sipil mengkritik WEF sebagai forum tertutup dan elitis. Contohnya ada *World Social Forum* (WSF) yang dibentuk pada tahun 2001 sebagai jawaban tandingan terhadap Davos, kemudian terdapat pula gerakan Occupy Davos dan Extinction Rebellion yang menuduh WEF sebagai panggung neoliberal elit yang bertanggung jawab atas krisis iklim, ketimpangan, dan de-demokratisasi kebijakan global, yang terakhir Oxfam yang secara rutin melaporkan kesenjangan kekayaan dunia tepat sebelum pertemuan WEF, hal itu dilakukan sebagai bentuk tekanan wacana.

Kasus WEF setelah krisis finansial global pada tahun 2008 memberikan gambaran paling nyata bagaimana global governance tidak selalu progresif. Ia bisa menjadi alat reproduksi struktur kekuasaan global yang eksklusif dan hegemonik. Dengan membingkai agenda neoliberalisme dalam istilah "reformasi" dan "kolaborasi", WEF melegitimasi keberlanjutan sistem yang menguntungkan elit global sambil menciptakan ilusi partisipasi masyarakat sipil. Agenda WEF pasca krisis keuangan 2008 mencerminkan keberpihakan yang

kuat terhadap nilai-nilai dan kepentingan neoliberal. Meskipun telah terjadi beberapa pergeseran ke arah retorika yang lebih inklusif dan berkelanjutan, prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap berpusat pada pasar dan berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa WEF terus mempromosikan pendekatan neoliberal terhadap tata kelola global, bahkan ketika WEF beradaptasi dengan tantangan dan kritik baru.

Konsep tata kelola global dari perspektif non-negara-sentris semakin banyak digunakan untuk menjelaskan peran World Economic Forum (WEF) dalam tata kelola global, terutama setelah krisis keuangan 2008. Perspektif ini menekankan pentingnya berbagai aktor non-negara, termasuk swasta, publik, antarpemerintah, dan jaringan masyarakat sipil, dalam membentuk struktur dan kebijakan tata kelola global. Krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan pergeseran yang signifikan dalam tata kelola ekonomi global, dengan mendesentralisasikan kewenangan dari model tradisional yang berpusat pada negara. Pergeseran ini melibatkan pengintegrasian lebih banyak aktor dan jaringan yang lebih beragam ke dalam proses tata kelola, yang mencakup forum-forum seperti WEF (Luckhurst, 2019). WEF, melalui pertemuan tahunan dan berbagai inisiatifnya, telah menjadi platform penting bagi para pelaku yang beragam ini untuk berkolaborasi dan mempengaruhi norma-norma dan praktik-praktik kebijakan global.

Jaringan tata kelola, termasuk WEF, telah memainkan peran penting dalam desentralisasi tata kelola ekonomi global. Jaringan-jaringan ini memfasilitasi kontestasi kebijakan, advokasi, dan kapasitas untuk mengubah agenda tata kelola global. Keterlibatan WEF dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil, menjadi contoh pendekatan yang tidak berpusat pada negara dalam tata kelola global (Luckhurst, 2020). Pasca tahun 2008, telah terjadi pergerakan menuju bentuk-bentuk baru kerja sama internasional yang fleksibel dan eksperimental. Pertemuan dan diskusi informal WEF di antara para pemimpin global telah menjadi penting untuk bertukar sudut pandang, mengoordinasikan tindakan, dan memantau kepatuhan sukarela tanpa memikul kewajiban hukum. Pendekatan informal ini selaras dengan perspektif non-negara-sentris, yang menyoroti peran WEF dalam memfasilitasi tata kelola global melalui dialog dan pembangunan konsensus (Napolitano, 2011).

Krisis keuangan menyoroti munculnya pemain-pemain baru dan dinamika kekuasaan dalam tata kelola global. WEF telah berperan penting dalam mengintegrasikan para pelaku baru ini, termasuk negara-negara berkembang dan entitas sektor swasta, ke dalam kerangka kerja tata kelola global. Integrasi ini telah membantu mendiversifikasi para aktor yang terlibat

dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi global (Luckhurst, 2017). Perspektif non-negara-sentris mengenai tata kelola global secara efektif menjelaskan peran WEF di era pasca krisis keuangan 2008. Dengan mendesentralisasikan kewenangan, memanfaatkan jaringan tata kelola, mempromosikan kerja sama informal, dan mengintegrasikan pelaku-pelaku baru, WEF telah secara signifikan berkontribusi dalam membentuk tata kelola ekonomi global dengan cara yang lebih inklusif dan kolaboratif.

WEF sebagai Agen Global Governance

World Economic Forum (WEF) telah memainkan peran penting sebagai agen tata kelola global setelah krisis ekonomi global tahun 2008. WEF menyediakan platform penting untuk dialog di antara para pemimpin global, pembuat kebijakan, dan eksekutif bisnis. Hal ini memfasilitasi pertukaran ide dan koordinasi kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis secara efektif (Napolitano, 2011). Pendekatan WEF terhadap tata kelola global melibatkan pengintegrasian berbagai aktor, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Inklusivitas ini membantu desentralisasi kewenangan dan diversifikasi aktor yang terlibat dalam tata kelola ekonomi global (Luckhurst, 2020). WEF berperan dalam menyebarkan norma-norma dan praktik-praktik kebijakan baru yang sangat penting untuk menstabilkan ekonomi global. Hal ini termasuk mengadvokasi peraturan keuangan yang lebih kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Luckhurst, 2019). WEF juga memajukan kesetaraan gender melalui inisiatif seperti Women Leaders and Gender Parity Program. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan ekonomi, yang mencerminkan komitmen yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif (Prügl & True, 2014).

WEF memfasilitasi jaringan tata kelola informal yang memungkinkan pendekatan yang fleksibel dan eksperimental terhadap tata kelola ekonomi global. Jaringan-jaringan ini memungkinkan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap krisis tanpa hambatan kewajiban hukum formal (Napolitano, 2011). Pertemuan tahunan dan pertemuan puncak WEF menjadi tempat yang penting untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan tanggapan terhadap krisis ekonomi. Pertemuan-pertemuan ini memungkinkan para pemimpin dari berbagai sektor untuk berkolaborasi dan mengembangkan strategi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi (Wang, 2018). WEF memperkenalkan inisiatif seperti Energy Transition Index (ETI) untuk mempromosikan praktik-praktik energi berkelanjutan. Indeks ini membantu mengukur dan memandu kemajuan negara-negara dalam transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, yang mencerminkan agenda tata kelola WEF yang lebih luas (Owjimehr & Samadi, 2023).

Upaya WEF berkontribusi pada desentralisasi tata kelola ekonomi global, menjauh dari pusat-pusat kekuasaan tradisional seperti G7/8 dan menggabungkan aktor-aktor yang lebih beragam dan representatif. Dengan membina kerja sama di antara berbagai negara dan sektor, WEF membantu menstabilkan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kerja sama ini sangat penting dalam mengatasi dampak langsung dari krisis dan mencegah gangguan ekonomi di masa depan (Napolitano, 2011). Forum Ekonomi Dunia telah berperan penting dalam membentuk tata kelola ekonomi global pasca 2008 dengan menyediakan platform untuk dialog, mengintegrasikan beragam pelaku, mempromosikan norma-norma kebijakan baru, dan memfasilitasi jaringan tata kelola informal. Upaya-upaya ini telah berkontribusi pada pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan inklusif terhadap tata kelola ekonomi global.

Tiga Agenda Utama WEF Pasca Krisis

World Economic Forum (WEF) telah meluncurkan beberapa inisiatif penting dalam menanggapi tantangan ekonomi global setelah krisis keuangan tahun 2008. Inisiatif-inisiatif ini termasuk Inisiatif *Global Redesign Initiative* (2009), *Fourth Industrial Revolution* (2016), dan *The Great Reset* (2020). Masing-masing agenda ini membahas aspek-aspek yang berbeda dari transformasi ekonomi dan sosial global. Yang pertama adalah *Global Redesign Initiative* yang diluncurkan untuk memikirkan kembali dan mentransformasi struktur tata kelola global sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan tahun 2008. Inisiatif ini bertujuan untuk membahas legitimasi, relevansi, dan efektivitas kerangka kerja tata kelola ekonomi global yang ada saat ini (Shaw, 2016). GRI menekankan perlunya solusi kolaboratif yang melibatkan para ilmuwan, pembuat kebijakan publik, akademisi, dan pemimpin bisnis untuk mengatasi masalah-masalah global yang paling mendesak. GRI berusaha untuk menantang asumsi-asumsi yang ada, memantau tren, mengusulkan solusi, dan menyusun strategi untuk tata kelola global yang efektif (Jay, 2011).

Selanjutnya adalah *Fourth Industrial Revolution* yang diperkenalkan pada konferensi WEF 2016, Revolusi Industri Keempat (4IR) berfokus pada integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis, yang secara fundamental mengubah industri dan masyarakat (Barton, 2020). 4IR mencakup kemajuan seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), data besar, robotika, dan komputasi awan. Teknologi-teknologi ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang signifikan di semua sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan (Dremova, 2019). 4IR bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pekerjaan dan tantangan di masa depan dengan mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan keterampilan digital. Hal ini

juga menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan memastikan bahwa kemajuan teknologi bermanfaat bagi semua wilayah, termasuk negara-negara berkembang (Masters, 2021).

Agenda utama WEF yang terakhir adalah *The Great Reset*, diumumkan pada pertengahan tahun 2020, Great Reset bertujuan untuk membangun kembali ekonomi global secara berkelanjutan setelah pandemi COVID-19. Hal ini menekankan kapitalisme pemangku kepentingan, praktik yang lebih ramah lingkungan, dan kontrak sosial yang lebih adil (Roth, 2021). *The Great Reset* menyerukan perubahan radikal di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kontrak sosial, dan kondisi kerja. Hal ini mengadvokasi kerja sama global dan transformasi industri untuk beradaptasi dengan kondisi dan cara kerja yang baru (Özkul & Bayram, 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi, utang publik, lapangan kerja, dan kesejahteraan manusia. Inisiatif ini juga menyoroti perlunya teori manajemen dan organisasi yang menganalisis tren sosial makro dan bukan hanya beradaptasi dengan tren tersebut (Roth, 2021). Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen WEF untuk menjawab tantangan global melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih tangguh dan adil.

4. KESIMPULAN

World Economic Forum (WEF) merupakan aktor kunci dalam dinamika tata kelola global pasca krisis keuangan 2008 yang mencerminkan pergeseran menuju model global governance non-negara-sentris. Melalui berbagai inisiatif seperti Global Redesign Initiative, Fourth Industrial Revolution, dan *The Great Reset*, WEF berperan aktif membentuk wacana dan arah kebijakan global. Namun, di balik narasi kolaboratif dan inklusif yang diusungnya, WEF justru mereproduksi nilai-nilai dan kepentingan neoliberalisme dalam wajah baru yaitu mengukuhkan peran aktor privat dan mekanisme pasar dalam tata kelola global. Alih-alih melakukan transformasi struktural yang inklusif, agenda-agenda WEF cenderung memperhalus dominasi elit global dengan bahasa keberlanjutan dan partisipasi simbolik. Konsep global governance yang dijalankan WEF membuka ruang kolaborasi multiaktor, namun tanpa akuntabilitas yang memadai, model ini berpotensi memperlebar ketimpangan, mengaburkan peran negara, serta melemahkan demokratisasi dalam pengambilan keputusan global. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa meskipun WEF memainkan peran penting dalam struktur global governance kontemporer, dominasi wacana dan nilai-nilai neoliberal di balik agenda-agendanya menimbulkan dilema normatif serius yang perlu dikritisi secara

mendalam. Perlu dorongan bagi tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas, bukan hanya elite ekonomi dunia.

REFERENSI

- Allouche, J., Middleton, C., & Gyawali, D. (2015). Technical veil, hidden politics: Interrogating the power linkages behind the nexus. *Water Alternatives*, 8(1), 610–626.
- Barton, C. (2020). The Fourth Industrial Revolution: Promise or peril? In *Proceedings of the International Symposium on Technology and Society* (pp. 302–309). Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://doi.org/10.1109/ISTAS50296.2020.9462215>
- Chowdhury, A., & Žuk, P. (2018). From crisis to crisis: Capitalism, chaos and constant unpredictability. *Economic and Labour Relations Review*, 29(4), 375–393. <https://doi.org/10.1177/1035304618811263>
- Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global governance as a perspective on world politics. *Global Governance*, 12(2), 185–203. <https://doi.org/10.1163/19426720-01202006>
- Dremova, E. (2019). Economic aspects for ensuring justice in the context of the industrial development system formation. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(5), 1408–1414.
- Elias, J. (2013). Davos woman to the rescue of global capitalism: Postfeminist politics and competitiveness promotion at the world economic forum. *International Political Sociology*, 7(2), 152–169. <https://doi.org/10.1111/ips.12015>
- Jay, O. (2011). The Global Agenda Council on the ageing society: Policy principles. *Global Policy*, 2(1), 97–105. <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2010.00053.x>
- Likić-Brborić, B. (2024). Business-led governance of migration and development: A challenge for civil society. In *Handbook on migration and development: A counter-hegemonic perspective* (pp. 367–384). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789907131.00034>
- Luckhurst, J. (2017). *The shifting global economic architecture: Decentralizing authority in contemporary global governance*. Springer.
- Luckhurst, J. (2019). The G20 hub of decentralizing global governance authority. *International Organisations Research Journal*, 14(2), 7–34. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-02-01>
- Luckhurst, J. (2020). Networks decentralizing authority in global economic governance. In *The future of global economic governance: Challenges and prospects in the age of uncertainty* (pp. 29–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35336-0_3
- Marshall, A. (2015, January 20). World Economic Forum: A history and analysis. Transnational Institute. Retrieved May 26, 2025, from <https://www.tni.org/en/article/world-economic-forum-a-history-and-analysis>
- Masters, L. (2021). Africa, the Fourth Industrial Revolution, and digital diplomacy: (Re)negotiating the international knowledge structure. *South African Journal of International Affairs*, 28(3), 361–377. <https://doi.org/10.1080/10220461.2021.1961605>

- McNeill, D. (2023). The World Economic Forum: An unaccountable force in global health governance? *Global Policy*, 14(5), 782–789. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13254>
- Napolitano, G. (2011). The two ways of global governance after the financial crisis: Multilateralism versus cooperation among governments. *International Journal of Constitutional Law*, 9(2), 310–339. <https://doi.org/10.1093/icon/mor038>
- Owjimehr, S., & Samadi, A. (2023). Energy transition determinants in the European Union: Threshold effects. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(9), 22159–22175. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23743-w>
- Özkul, F., & Bayram, S. (2023). *Great reset and the new deal after COVID-19*. Peter Lang. <https://doi.org/10.3726/b20387>
- Prügl, E., & True, J. (2014). Equality means business? Governing gender through transnational public-private partnerships. *Review of International Political Economy*, 21(6), 1137–1169. <https://doi.org/10.1080/09692290.2013.849277>
- Putri, S. A. (2018). Penyebab krisis finansial global tahun 2008: Kegagalan financial development dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 155–169. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.5853>
- Roth, S. (2021). The great reset of management and organization theory: A European perspective. *European Management Journal*, 39(5), 538–544. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.05.005>
- Saqer, A. (2023). Repackaging growth at Davos: The World Economic Forum’s inclusive growth and development approach. *Review of International Political Economy*, 30(3), 914–938. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2070522>
- Shaw, T. (2016). Lisbon and EPAs: What prospects for regional development in Africa and the Caribbean? In *The EU’s Lisbon treaty: Institutional choices and implementation* (pp. 243–264). Taylor & Francis.
- Walker, C. (2021). Climate change and risk to workers: Piecing together the puzzle. In *Identifying and managing risk at work: Emerging issues in the context of globalisation* (pp. 9–111). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003164029-10>
- Wang, W. (2018). China and G20: From a think tank case perspective. In *Think tanks and emerging power policy networks* (pp. 31–39). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71955-9_3
- World Economic Forum. (n.d.). *Our mission*. Retrieved May 26, 2025, from <https://www.weforum.org/about/world-economic-forum/>